



PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR

# RENCANA KERJA TAHUN 2025

+



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA DENPASAR**





WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta wara nugraha Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada lembaga untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2023, perkiraan capaian RENJA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sampai dengan tahun 2024, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Demikian kami sampaikan, semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.



Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kota Denpasar

**I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196610111995031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah .....	16
2.4. Review terhadap RKPD .....	18
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>23</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	24
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	25
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>37</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2017 dibentuklah Lembaga/Instansi baru di Kota Denpasar yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka pada tanggal 29 Desember 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ditetapkan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17, Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan

- penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
  - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
  - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
  - i. pelaksanaan administrasi badan; dan
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja yang mengacu pada visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”** serta membuat program kegiatan berpedoman kepada Misi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut diatas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menyusun dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marmkesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 83);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2006, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
  23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
  24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041;
  25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja (RENJA) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2025 adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar selama tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD Kota Denpasar Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan hambatan; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat evaluasi dan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini disajikan rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Tahun 2023, anggaran Belanja Langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sebesar Rp 8.787.716.587,00 yang terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Realisasi fisik yang dapat dicapai sampai dengan triwulan IV sebesar 96,73% dan realisasi keuangan sebesar 88,85% yaitu Rp 7.807.615.721,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menganggarkan 2 (dua) program 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 9.895.878.495,00.

Secara rinci, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 disampaikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kota Denpasar**

Kode Rekening	Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024					
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>														
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	100%				
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%				
5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 orang	39 orang	37 orang	37 orang	100%	39 orang	115 orang	58%
5	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 pegawai	0 pegawai	0 pegawai	0 pegawai	0%	0 pegawai	0 pegawai	0%
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
5 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 paket	6 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	12 paket	67%
5 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	5 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	13 paket	62%
5 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
5 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	10 dokumen	63%
5 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
5 05 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	1 dokumen	100%
5 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
5 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	232 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	164 unit	0 unit	9 unit	9 unit	100%	0 unit	9 unit	5%
5 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
5 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
5 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
5 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
5 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
5 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%
5 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 unit	18 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	54 unit	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	3 unit	8 unit	8 unit	100%	3 unit	14 unit	40%
5 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	0 unit	2 unit	40%
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	75%	78,13%	70%	85.19%	121.70%	70%		
		Persentase penetapan inovasi daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan	100%	100%	0 %	0 %	0%	100%		
5 05 02 2.01 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	1 laporan	100%
5 05 02 2.01 0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
5 05 02 2.01 0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	1 laporan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024					
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
5	05	02	2.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	50%
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	1 dokumen	33%
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	0 dokumen	2 dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024					
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5	05	02	2.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5	05	02	2.03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	50%
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	2 dokumen	100%
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	50%
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5 05 02 2.03 0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5 05 02 2.03 0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	0 dokumen	4 dokumen	400%
5 05 02 2.03 0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
5 05 02 2.03 0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
<b>5 05 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%
5 05 02 2.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%
5 05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 laporan	0 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	0 laporan	3 laporan	60%
5 05 02 2.04 0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	2 laporan	2 laporan	50%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator dari sasaran merupakan ukuran pencapaian kinerja layanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase hasil kelitbangan yang menjadi rekomendasi kebijakan oleh Kepala Daerah.
2. Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang diimplementasikan.

Tahun 2023, persentase hasil-hasil penelitian kelitbangan beberapa sudah direkomendasikan menjadi Kebijakan Kepala Daerah karena merupakan hasil temuan BPK dan sudah dibuatkan draf rancangan peraturan daerah, serta ditindaklanjuti oleh OPD terkait menjadi peraturan daerah.

Dalam rangka implementasi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang SINAS IPTEK Pasal 34-38 mengenai invensi dan inovasi yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan ekosistem inovasi untuk mengelola produk unggulan daerah, mempercepat pembangunan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) melalui Deputi Bidang Penguatan Inovasi, pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pemetaan secara nasional terhadap daya saing daerah baik Provinsi maupun kabupaten kota dengan menggunakan sebuah instrumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dibangun berdasarkan konsep multisektoral sehingga secara holistik menggambarkan kondisi ekosistem inovasi.

Tujuan dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah memetakan tingkat daya saing daerah baik level provinsi dan kabupaten/kota, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Secara rinci target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar  
sampai dengan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi rekomendasi kebijakan oleh kepala daerah	70%	70%	70%	75%	75%	78,13%	85,19%
		Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar  
sampai dengan Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	75%	75%	75%	75%	75%	60%	57,14%
2	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	persen	70%	70%	70%	75%	75%	78,13%	85,19%
3	Persentase fasilitasi dalam penetapan inovasi daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	persen	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar adalah merupakan bagian yang berintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan demikian harus sinkron dan sinergi program-program yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

Tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan. Hal ini nantinya untuk mendukung analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, melalui penelitian, pengkajian, pengembangan serta perekayasa.

Permasalahan dan hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi perangkat daerah adalah:

- a. Dari aspek kualitas sumber daya aparatur, karena dari 35 personil yang ada Badan Riset dan Inovasi Daerah belum mempunyai tenaga peneliti. Sumber daya aparatur terdiri dari:

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/b)	1 orang	-	1 orang
Sekretaris (Eselon III/a)	-	-	-
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1 orang	1 orang
<b>B. Pejabat Fungsional</b>			
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang	4 orang	5 orang
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Pembina (IV/a)	-	-	-
Penata Tk. I (III/d)	-	4 orang	4 orang
Penata (III/c)	2 orang	1 orang	3 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	2 orang	-	2 orang
Penata Muda (III/a)	7 orang	4 orang	11 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	4 orang	1 orang	5 orang
Pengatur (II/c)	1 orang	-	1 orang
<b>D. Staf Fungsional</b>			
Penata Muda (IX)	-	2 orang	2 orang

Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur masih kurang memadai, dibandingkan beban tugas yang harus dilaksanakan.

- b. Dari aspek pendidikan sumber daya aparatur, memiliki 35 personil dengan rincian:

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	1 orang	2 orang	3 orang
Sarjana S1	10 orang	14 orang	24 orang
Diploma IV	-	-	-
Diploma III/SM (DIII)	1 orang	-	1 orang
SLTA	5 orang	1 orang	6 orang
SLTP	1 orang	-	1 orang
SD	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18 orang</b>	<b>17 orang</b>	<b>35 orang</b>

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi akan sedikit mengalami hambatan karena keterbatasan personil dan kekurangan tenaga yang berkompeten dalam bidangnya untuk melakukan kajian, telaahan, perekayasaan yang terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan.

Apabila permasalahan dan hambatan sumber daya aparatur yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah maka hal ini akan memberikan dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun. Terutama terhadap capaian program kegiatan yang sudah dirancang.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah:

- a. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian baik yang bersifat strategis, aktual maupun kompetitif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat
- b. Dalam pengembangan rancangan regulasi pemodelan kebijakan dan program
- c. Ketika melakukan perekayasaan Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan Model Kebijakan dan Program, termasuk juga penerapan uji model kebijakan/program

Peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan adalah melakukan kerjasama melalui MoU, kesepakatan bersama dengan instansi/institusi sektoral maupun lembaga perguruan tinggi atau akademisi, terutama yang menyangkut pembuatan naskah akademisi, rancangan regulasi, melakukan survei yang melibatkan tenaga profesional termasuk melaksanakan Seminar Nasional dan Fokus Grup Diskusi, Diseminasi Kelitbangan.

#### **2.4. Review terhadap RKPD**

Dalam dokumen rencana kerja, perlu diadakan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemukan dalam proses pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Secara rinci revidu terhadap Dokumen RKPD disajikan pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Reviu terhadap RKPD Tahun 2025**  
**Kota Denpasar**

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				10,449,937,581	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>				10,449,937,581	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR</b>	<b>84%</b>	<b>9,020,392,181</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR</b>	<b>84%</b>	<b>9,020,392,181</b>	
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>6,667,364,971</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>6,667,364,971</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	36 orang/bulan	6,667,364,971	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	36 orang/bulan	6,667,364,971	
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>518,109,750</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>518,109,750</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	9,251,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	9,251,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 Paket	95,992,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 Paket	95,992,400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	2 Paket	200,847,050	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	2 Paket	200,847,050	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	127,230,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	127,230,300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 dokumen	10,440,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 dokumen	10,440,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	1 laporan	74,349,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	74,349,000	
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>551,536,550</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>551,536,550</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	35 unit	117,036,550	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	35 unit	117,036,550	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	27 unit	434,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	27 unit	434,500,000	
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>877,030,910</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>877,030,910</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	211,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	211,500,000	

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	44,180,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	44,180,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	621,350,910	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	621,350,910	
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>406,350,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>406,350,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	46,450,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	46,450,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	18 Unit	147,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	18 Unit	147,300,000	
	Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	8 Unit	22,600,000	Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	8 Unit	22,600,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	190,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	190,000,000	
II	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH</b>	<b>KOTA DENPASAR</b>	<b>70%</b>	<b>1,429,545,400</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH</b>	<b>KOTA DENPASAR</b>	<b>70%</b>	<b>1,429,545,400</b>	
		<b>PERSENTASE PENETAPAN INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN</b>		<b>100%</b>			<b>PERSENTASE PENETAPAN INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN</b>		<b>100%</b>		
1	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>70%</b>	<b>265,776,000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>70%</b>	<b>265,776,000</b>	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbitan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbitan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Denpasar	2 laporan	265,776,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbitan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbitan dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Denpasar	2 laporan	265,776,000	
2	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	<b>70%</b>	<b>-</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Kota Denpasar	-	-	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Kota Denpasar	-	-	

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	Kota Denpasar	-	135,468,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	Kota Denpasar	-	135,468,000	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Denpasar	-	-	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Denpasar	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Denpasar	1 dokumen	135,468,000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Denpasar	1 dokumen	135,468,000	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	1,028,301,400	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	1,028,301,400	
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Denpasar	1 Dokumen	433,963,500	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Denpasar	1 Dokumen	433,963,500	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Denpasar	1 Laporan	64,914,500	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Denpasar	1 Laporan	64,914,500	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Denpasar	3 Laporan	387,903,900	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Denpasar	3 Laporan	387,903,900	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Denpasar	3 Laporan	141,519,500	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Denpasar	3 Laporan	141,519,500	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pengaruh globalisasi dunia dan tekanan arus reformasi berperan penting dalam mendorong iklim demokratisasi secara nasional, telah menjadi isu utama di tengah masyarakat Indonesia serta disadari pula bahwa hal ini mengakibatkan terjadinya dinamika yang cukup tinggi di kalangan masyarakat.

Bersamaan dengan hal itu penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan dua puluh tahun lamanya, namun masih dijumpai berbagai persoalan yang perlu menjadikan perhatian dan penyelesaian secara nyata dan harmonis oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Permasalahan tersebut tentunya tidak terlepas akibat dari pengaruh adanya perubahan secara terbuka cara pandang masyarakat yang didukung juga oleh teknologi Informasi.

Menghadapi permasalahan yang terjadi sebagai implikasi penerapan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu penetapan kebijakan nasional yang strategis dalam relevansinya terhadap tanggung jawab penetapan dan penyelenggaraan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk berbagai kebijakan nasional serta kebijakan publik yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dinamika pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks penetapan kebijakan strategis menjadi telahaan atau kajian secara strategis, aktual dan kompetitif untuk bisa dijadikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan untuk mendukung terbentuknya Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

Secara faktual dan pustaka (referensi) kenyataannya penetapan kebijakan nasional dan propinsi selama ini cenderung menimbulkan permasalahan bagi pelaksana penyelenggara pemerintahan di daerah, yang antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar kebijakan, baik yang setara (selevel) maupun antar tingkatan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Permasalahan penetapan kebijakan tersebut tidak saja terjadi antar institusi/lembaga sektoral ditingkat pusat, namun juga antar unit sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Kebijakan Nasional yang ditetapkan terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah utama, bahkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membebani masyarakat, sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian di daerah.
- c. Adanya indikasi rendahnya profesionalisme, kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga masih ada produk kebijakan serta Peraturan Daerah yang cenderung kontra-produktif terhadap berkembangnya kualitas pelayanan publik dan produktivitas ekonomi lokal.

Dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi dimaksud maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan (*research and development*) semestinya akan menjadi sangat penting dan strategis.

Fungsi penelitian dan pengembangan pada era otonomi daerah harus mampu meneliti, mengkaji serta mengembangkan untuk memecahkan segala permasalahan yang berkembang serta mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara representative, obyektif, valid dan reliable.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar pada tahun 2025, sejalan dengan tujuan strategis, adalah **“Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi inovasi daerah.”**

#### b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Secara rinci sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator sasaran:  
Persentase hasil kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah.
2. Meningkatnya fasilitasi inovasi daerah. Indikator sasaran:  
Persentase inovasi daerah yang ditetapkan.

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar hingga tahun 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dimana visi Pemerintah Kota Denpasar adalah “Denpasar Kota Berbudaya dilandasi Tri Hita Karana”
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
  3. Visi dan Misi Kepala Daerah, dimana telah ditentukan visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**”, sedangkan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu:
    - a. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
    - b. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
    - c. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
    - d. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
    - e. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar merancang 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.  
Program dan kegiatan prioritas yang dirancang sebanyak 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan serta didukung oleh 1 (satu) program penunjang dengan 5 (lima) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

Berikut disampaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang dirancang pada tahun 2025 secara rinci:

### Program dan Kegiatan Prioritas

#### Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada Bidang Sosial dan Pemerintahan serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan target output 2 (dua) laporan yaitu:

#### 1. Laporan Kajian Jumlah Ideal Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025

Kajian Jumlah Ideal Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan dokumen sebagai pedoman rencana pengusulan dan memberikan arah kebijakan dalam menentukan jumlah Ideal Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025.

Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah:

- a. Menjabarkan kondisi dan analisa secara komprehensif terkait Petugas Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
- b. Menyediakan dokumen resmi yang menjadi rekomendasi kebijakan dalam menentukan Jumlah Ideal Satpol PP Kota Denpasar;
- c. Mendapatkan data-data kajian yang lebih transparan dan akuntabel untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

#### 2. Laporan Kajian Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Denpasar Tahun 2025

Kajian Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Denpasar Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan dokumen sebagai pedoman menentukan lokasi daerah rawan gangguan sehingga dapat dipergunakan sebagai rencana pengusulan kegiatan dan memberikan arah kebijakan antisipasi dan penanganan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ada 3 (Tiga) tujuan dari kajian ini yaitu:

- a. Menjabarkan kondisi dan analisa secara konprehensif terkait daerah dan lokasi rawan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar;
  - b. Menyediakan dokumen resmi yang menjadi rekomendasi kebijakan dalam menentukan antisipasi dan tindaklanjut terhadap daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar;
  - c. Mendapatkan data-data kajian yang lebih transparan dan akuntabel untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan OPD terkait.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kegiatan ini dirancang memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan diantaranya:
    - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan target output 1 (satu) dokumen, yaitu Kajian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Kota Denpasar. Pada sub kegiatan ini bermaksud agar Denpasar sebagai Ibukota Provinsi dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman agar dapat menciptakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien. Adapun tujuan Kajian Akademik sebagai berikut:
      - a. Mengkaji pencemaran air di badan air permukaan di Kota Denpasar;
      - b. Menentukan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di Kota Denpasar;
      - c. Menentukan Type Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Permukiman yang sesuai untuk permukiman di Kota Denpasar.
  - Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
    - Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi memiliki target output 1 (satu) dokumen dengan maksud dan tujuan:
      - a. Untuk memotivasi Perangkat Daerah Kota Denpasar untuk menciptakan inovasi daerah yang berkualitas;
      - b. Untuk memberikan apresiasi pada perangkat daerah yang telah menciptakan inovasi;
      - c. Untuk mengevaluasi inovasi yang telah berjalan.

- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi memiliki target 1 (satu) laporan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
  - a. Pembangunan dan pengembangan Kota Denpasar menjadi lebih terarah baik dalam jangka pendek, menengah dan maupun dalam jangka panjang sehingga Kota Denpasar dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan kita bersama;
  - b. Kreativitas, inovasi Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kota Denpasar semakin terbangun.
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan dengan target output 2 (dua) laporan yang memiliki maksud:
  - a. Melaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan di Bidang Inovasi dan Teknologi, BRIDA Kota Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan untuk menyebarluaskan hasil-hasil kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Denpasar dan pihak-pihak terkait;
  - c. Mengumpulkan stakeholder terkait dalam suatu waktu dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan. Adapun tujuannya adalah:
    - a. Meningkatnya pemahaman para stakeholder yang tersebut dalam kajian-kajian yang telah dilaksanakan;
    - b. Tersampainya rekomendasi hasil-hasil kelitbangan;
    - c. Menjadikan hasil-hasil kelitbangan sebagai salah satu dasar dari pembuatan suatu kebijakan.
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, memiliki target 2 (dua) laporan dengan maksud:
  - a. Melaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Inovasi dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
  - b. Melakukan pembentukan Sentra HKI dalam mewujudkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - c. Mengadakan Sosialisasi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Inovasi Daerah yang diciptakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Denpasar;
- b. Memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi hasil karya Masyarakat Kota Denpasar di segala bidang;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Masyarakat Umum di Kota Denpasar.

#### Program dan Kegiatan Pendukung

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut disampaikan secara rinci Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kota Denpasar**

Nama Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				10,449,937,581				13,415,509,059.44
5 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR</b>	<b>84%</b>	<b>9,020,392,181</b>			<b>85%</b>	<b>11,809,780,944.46</b>
5 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>6,667,364,971</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>8,242,240,334.00</b>
5 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	36 orang/bulan	6,667,364,971	APBD		36 orang/bulan	8,242,240,334.00
5 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>518,109,750</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>567,842,875.92</b>
5 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	9,251,000	APBD		1 Paket	17,980,960.85
5 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 Paket	95,992,400	APBD		3 Paket	139,211,843.10
5 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	2 Paket	200,847,050	APBD		2 Paket	262,194,065.42
5 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Paket	127,230,300	APBD		1 Paket	58,884,271.88
5 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	3 dokumen	10,440,000	APBD		3 dokumen	60,684,016.80
5 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	74,349,000	APBD		1 laporan	28,887,717.87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 05 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>551,536,550</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>833,038,534.79</b>
5 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	35 unit	117,036,550	APBD		70 unit	269,424,080.09
5 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	27 unit	434,500,000	APBD		49 unit	563,614,454.70
5 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>877,030,910</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1,622,038,623.25</b>
5 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	211,500,000	APBD		1 laporan	364,780,515.00
5 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	44,180,000	APBD		1 laporan	87,450,693.00
5 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 laporan	621,350,910	APBD		1 laporan	1,169,807,415.25
5 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar</b>	<b>1 laporan</b>	<b>406,350,000</b>	<b>APBD</b>		<b>1 laporan</b>	<b>544,620,576.50</b>
5 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	46,450,000	APBD		1 Unit	64,984,078.50
5 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	18 Unit	147,300,000	APBD		18 Unit	257,359,498.00
5 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	8 Unit	22,600,000	APBD		8 Unit	39,264,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	1 Unit	190,000,000	APBD		1 Unit	183,012,500.00
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH</b>	KOTA DENPASAR	75%	1,429,545,400			75%	1,605,728,114.98
		<b>PERSENTASE PENETAPAN INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN</b>		100%				100%	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	265,776,000	APBD		75%	-
5 05 02 2.01 0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Denpasar	2 laporan	265,776,000	APBD		-	-
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	-	APBD		75%	-
5 05 02 2.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Kota Denpasar	-	-	APBD		-	-
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	135,468,000	APBD		75%	-
5 05 02 2.03 0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Denpasar	1 dokumen	-	APBD		-	-
5 05 02 2.03 0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Denpasar	1 dokumen	135,468,000	APBD		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan	Kota Denpasar	100%	1,028,301,400			100%	1,605,728,114.98
5 05 02 2.04 0001	Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Denpasar	1 Dokumen	433,963,500	APBD		1 dokumen	993,365,789.02
5 05 02 2.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Denpasar	1 Laporan	64,914,500	APBD		1 laporan	114,544,741.96
5 05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Denpasar	3 Laporan	387,903,900	APBD		1 laporan	452,817,584.00
5 05 02 2.04 0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Denpasar	3 Laporan	141,519,500	APBD		1 laporan	45,000,000.00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar merancang 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp 10.449.937.581,00.

Berikut disampaikan secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 beserta Rencana Pendanaan :

Tabel 4.1  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				<b>10,449,937,581</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>100%</b>	<b>9,020,392,181</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>6,667,364,971</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	6,667,364,971
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>518,109,750</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,251,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	95,992,400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	200,847,050
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	127,230,300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	10,440,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	74,349,000

<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>551,536,550</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 unit	117,036,550
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 unit	434,500,000
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>877,030,910</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	211,500,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	44,180,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	621,350,910
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>406,350,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46,450,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	147,300,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	22,600,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190,000,000
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN OLEH KEPALA DAERAH</b>	<b>75%</b>	<b>1,429,545,400</b>
		<b>PERSENTASE PENETAPAN INOVASI DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN</b>	<b>100%</b>	

<b>6</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>265,776,000</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 laporan	265,776,000
<b>7</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>135,468,000</b>
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	135,468,000
<b>8</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan</b>	<b>100%</b>	<b>1,028,301,400</b>
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	433,963,500
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	64,914,500
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	387,903,900
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	141,519,500

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar mengacu pada RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2021-2026 terutama dalam penetapan target-target kegiatan dan program yang dirancang untuk tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Denpasar.

Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan pencapaian target-target dimaksud sangat penting dalam pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar, dan apabila ketersediaan anggaran tidak dapat memenuhi kebutuhan tahun 2025, agar kemudian dirancang pada Rencana Kerja (RENJA) tahun selanjutnya untuk pemenuhan target RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar tahun 2025.
2. Sasaran strategis Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh kelompok fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.
3. Sumber dana untuk menjalankan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2025, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
4. Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 dilakukan dengan tertib dan obyektif. Pada akhir Tahun 2025 dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 yang merupakan evaluasi kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja periode selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 serta menjadi pedoman dalam pencapaian target-target kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Denpasar.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kota Denpasar



**I Made Pasek Mandira, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a stylized flourish at the end.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA